



LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA RESES
KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PADA RESES MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2023-2024**

TANGGAL 28 FEBRUARI – 3 MARET 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, MARET 2024**



**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PADA RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL 28 FEBRUARI – 3 MARET 2024**

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI selalu memantau dan mengawasi berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Sedangkan di dalam Pasal 60 ayat (3) huruf f juga menyebutkan bahwa Komisi dapat mengadakan kunjungan kerja di masa reses yang hasilnya akan dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti. Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja secara paralel ke 3 (tiga) daerah di Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Batam.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan, mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja, maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah tujuan kunjungan kerja. Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI di Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

I.2 Dasar Kegiatan

- a. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja berkelompok dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024.
- b. Keputusan Rapat Internal Komisi IX DPR RI tanggal 16 Januari 2024 pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023 - 2024.

I.3 Maksud dan Tujuan

- a. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI.
- b. Mendapatkan informasi realisasi program dan anggaran yang dibiayai APBN.
- c. Memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Kabupaten Bintan.
- d. Menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Bintan secara umum terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.

I.4 Peserta

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Bintan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Bapak **Emanuel Melkiades Laka Lena**. Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI sebagaimana *terlampir*.

I.5 Kegiatan Kunjungan Kerja

Dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Bintan, telah dilakukan pertemuan dengan Bupati Bintan dan instansi terkait bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan, dan jaminan sosial yaitu:

1. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bintan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan;
4. Kepala Perwakilan BKKBN Kepulauan Riau;
5. Kepala BP3MI Wilayah Bintan
6. Kepala Perwakilan BKKBN Kabupaten Bintan;
7. Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan (Kepri, Riau, Sumbar, dan Jambi);
8. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbarriau;
9. Direktur RSUP Kab. Bintan;
10. Perwakilan Loka POM Tj. Pinang.

II. GAMBARAN UMUM DAERAH

1 Gambaran Umum

Kabupaten Kepulauan Riau resmi berubah menjadi Kabupaten Bintan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006. Kabupaten Bintan mendapat julukan sebagai kepulauan "Segantang Lada" yang menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini. Daerah Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan "Paparan Sunda". Pulau-pulau yang tersebar merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan daerah daratan pra tersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia bagian Utara sampai Pulau Bangka dan Belitung di bagian Selatan. Perbatasan Kabupaten Bintan adalah:

- Utara : Kabupaten Natuna
- Selatan : Kabupaten Lingga
- Barat : Kota Tanjung Pinang
- Timur : Provinsi Kalimantan Barat

Luas daratan Kabupaten Bintan mencapai 1.318,21 km², dengan daerah terluas adalah Kecamatan Teluk Sebong dengan luas 285,72 km², dan daerah terkecil adalah Kecamatan Bintan Utara dengan luas 43,26 km².

Untuk wilayah administratif, Kabupaten Bintan terdiri atas 10 kecamatan, yaitu Teluk Bintan, Bintan Utara, Teluk Sebong, Seri Kuala Lobam, Bintan Timur, Gunung Kijang, Mantang, Bintan Pesisir, Toapaya, dan Tambelan.

Gambaran Umum Kesehatan Kabupaten Bintan

Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Bintan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2023, menyebutkan bahwa jumlah sarana kesehatan seperti rumah sakit berjumlah 2, yaitu terletak di Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Bintan Timur. Sedangkan jumlah puskesmas sampai tahun 2021 tercatat berjumlah 16 puskesmas, dan untuk puskesmas pembantu sebanyak 25 puskesmas pembantu.

Kecamatan Subdistrict	Rumah Sakit Hospital		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(23)	(4)
Teluk Bintan	-	-	-
Bintan Utara	-	-	-
Teluk Sebong	-	-	-
Seri Kuala Lobam	1	1	1
Bintan Timur	1	1	1
Gunung Kijang	-	-	-
Mantang	-	-	-
Bintan Pesisir	-	-	-
Toapaya	-	-	-
Tambelan	-	-	-
Bintan	2	2	2

Tabel Rumah Sakit

Kecamatan Subdistrict	Puskesmas Public Health Center		
	2019	2020	2021
(1)	(11)	(12)	(13)
Teluk Bintan	1	1	1
Bintan Utara	1	1	1
Teluk Sebong	3	3	4
Seri Kuala Lobam	2	2	3
Bintan Timur	2	2	-
Gunung Kijang	1	1	1
Mantang	1	1	1
Bintan Pesisir	2	2	2
Toapaya	1	1	2
Tambelan	1	1	1
Bintan	15	15	16

Tabel Puskesmas

Kecamatan Subdistrict	Puskesmas Pembantu Subsidiary of Public Health Center		
	2019	2020	2021
(1)	(14)	(15)	(16)
Teluk Bintan	4	5	5
Bintan Utara	1	1	1
Teluk Sebong	4	4	4
Seri Kuala Lobam	-	-	1
Bintan Timur	2	2	-
Gunung Kijang	2	2	2
Mantang	2	3	3
Bintan Pesisir	2	1	2
Toapaya	2	2	3
Tambelan	4	4	4
Bintan	23	24	25

Tabel Puskesmas Pembantu

Untuk keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Kabupaten Bintan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Dokter :182 (sudah termasuk dokter umum, spesialis dan dokter gigi)
- Perawat : 454
- Bidan : 318
- Tenaga Kefarmasian : 58
- Nutritionist : 27

dengan perincian per kecamatannya adalah:

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Dokter' <i>Doctor'</i>	Tenaga Gizi <i>Nutritionist</i>	Perawat <i>Nurse</i>	Bidan <i>Midwife</i>	Tenaga kefarmasian <i>Pharmacist</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Teluk Bintang	9	1	24	33	4
Bintang Utara	14	2	20	20	5
Teluk Sebong	11	2	22	19	4
Seri Kuala Lobam	49	7	148	64	17
Bintang Timur	70	6	152	94	17
Gunung Kijang	11	3	21	23	1
Mantang	3	1	12	15	2
Bintang Pesisir	7	3	25	21	4
Toapaya	5	1	14	14	1
Tambelan	3	1	16	15	3
Bintang	182	27	454	318	58

Untuk persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Jenis Jaminan <i>Types of Health Insurance</i>	2021	2022
(1)	(2)	(3)
BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) <i>BPJS Health Insurance for Poor and Near Poor</i>	28,86	34,36
BPJS Kesehatan Non-Penerima bantuan Iuran (Non-PBI) <i>BPJS Health</i>	24,67	29,93
Jamkesda <i>Regional Health Insurance</i>	21,28	11,07
Asuransi Swasta <i>Private Insurance</i>	-	0,37
Perusahaan/Kantor <i>Company/Office</i>	10,64	4,78
Tidak Menggunakan Asuransi	15,15	19,49
Bintang	16,97	16,10

Untuk penderita penyakit menular sepanjang tahun 2022 di Kabupaten Bintang, diare menjadi peringkat pertama dengan jumlah penderita sebanyak 1627 orang, dan TB menduduki peringkat kedua dengan jumlah penderita sebanyak 297 orang. Selanjutnya kasus DBD tahun 2022 sebanyak 85 orang, Malaria 45 orang, Pneumonia 44 orang, HIV/AIDS sebanyak 15 orang, Campak 14 orang, dan Kusta sebanyak 6 orang.

Gambaran Umum Ketenagakerjaan Kabupaten Bintan

Keadaan lapangan kerja Bintan mencatatkan perbaikan yang signifikan. Hal ini tercermin dari meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada Februari 2023, TPAK Bintan tercatat sebesar 69,96%, lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2022 yang sebesar 68,00%. Sementara TPT periode Februari 2023 sebesar 5,90%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,17%. Membaiknya kondisi ketenagakerjaan tersebut seiring dengan ketersediaan lapangan kerja yang meningkat dampak dari perekonomian yang terus tumbuh. Selain itu, pemerintah Kabupaten mendorong masyarakatnya untuk membuka usaha secara mandiri, salah satunya melalui program 100 ribu *entrepreneur*.

Bersamaan dengan pemulihan ekonomi yang terus membaik, terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bintan. Kondisi tersebut diindikasikan oleh sejumlah indikator, seperti turunnya nilai indeks kedalaman kemiskinan dan nilai indeks keparahan kemiskinan. Secara garis besar, persentase penduduk miskin di Bintan pada Maret 2023 sebesar 5,95%, mengalami penurunan kesejahteraan dibandingkan dengan posisi Maret 2022 sebesar 5,92%. Dari sisi pemerataan ekonomi, kesenjangan ekonomi Bintan semakin menyempit tercermin dari Rasio Gini yang turun dari 0,30% pada Maret 2022, menjadi 0,28% pada Maret 2023

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Bintan terus mengalami peningkatan yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan tahun 2022 sebesar 73,26, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 72,65. Dengan capaian tersebut, Bintan menduduki peringkat ke-3 IPM tertinggi di kawasan Sumatera dan peringkat ke-9 IPM tertinggi secara nasional. Peningkatan IPM Bintan didorong oleh komponen pengeluaran riil per kapita masyarakat yang meningkat seiring dengan pemulihan kinerja ekonomi.

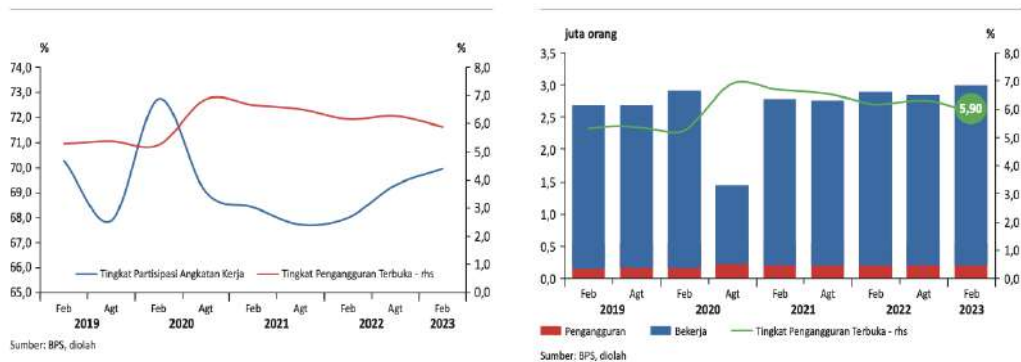
Indikator Ketenagakerjaan



Kegiatan Utama	2019		2020		2021		2022		2023
	Feb	Agt	Feb	Agt	Feb	Agt	Feb	Agt	Feb
Penduduk Usia Kerja	3.824	3.954	3.878	4.016	4.047	4.078	4.223	4.139	4.287,7
Angkatan Kerja	2.687,1	2.599,0	2.808,1	2.772,0	2.768,7	2.761,0	2.871,8	2.868,0	2.999,5
Bekerja	2.544,8	2.460,6	2.661,5	2.581,0	2.584,1	2.581,0	2.694,6	2.688,0	2.822,5
Pengangguran	142,2	138,5	146,6	190,6	185,0	180,0	177,0	180,0	177,0
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,3	67,5	72,41	69,01	68,41	67,72	68,00	69,30	69,96
Tingkat Pengangguran Terbuka(%)	5,3	5,4	5,22	6,88	6,67	6,52	6,17	6,28	5,90

Sumber: BPS, diolah

Jumlah angkatan kerja di Bintan pada pada Februari 2023 meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah angkatan kerja pada periode Februari 2023 sejumlah 3 juta orang, bertambah sebanyak 128 ribu orang atau meningkat sebesar 4,45% dibandingkan dengan Februari 2022. Jumlah penduduk usia kerja tercatat sebanyak 4,29 juta orang, naik 1,53% atau sebesar 64,71 ribu orang dibandingkan periode yang sama. Dengan perkembangan tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Bintan per Februari 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 69,96% dari 68,00% pada Februari 2022



Tingkat pengangguran Bintan tercatat menurun. Kondisi tersebut tercermin pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) periode Februari 2023 sebesar 5,90%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,17%. Turunnya persentase pengangguran seiring dengan ketersediaan lapangan kerja yang membaik dampak dari perekonomian yang terus tumbuh. Namun demikian, tingkat pengangguran di Bintan masih lebih tinggi dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,45%.

Turunnya tingkat pengangguran didorong oleh meningkatnya lapangan kerja. Hal ini tercermin dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan peningkatan indeks ketersediaan lapangan kerja pada Februari 2023 menjadi sebesar 105,00 dari 75,50 pada Februari 2022. Sejalan dengan peningkatan indeks ketersediaan lapangan kerja, persepsi masyarakat terhadap tingkat pendapatan dan daya beli juga meningkat, dimana indeks penghasilan konsumen meningkat dari 100,50 pada Februari 2022 menjadi 103,00 pada Februari 2023.

**III. HASIL KUNJUNGAN
BIDANG KESEHATAN**

A. KESEHATAN KABUPATEN BINTAN

Struktur APBD Kab. Bintan Bidang Kesehatan khususnya pada OPD Dinas Kesehatan Kab. Bintan meliputi :

1. Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	TA 2023	TA 2024
1	Belanja Operasi	210.445.507.645	211.346.799.221
	Belanja Pegawai	103.114.051.228	119.864.920.096
	Belanja Barang dan Jasa	107.104.942.417	91.151.879.125
	Belanja Hibah	226.514.000	330.000.000
2	Belanja Modal	6.254.914.542	10.459.025.668
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.667.779.542	8.734.025.668
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.584.135.000	1.725.000.000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.000.000	-
	Total	216.700.422.187	221.805.824.889

2. Berdasarkan Sumber Dana/ Anggaran

No	Sumber Dana/ Anggaran	TA 2023	TA 2024
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	162.365.399.532	163.096.831.389
2	Dana Alokasi Khusus (DAK)	19.246.658.000	27.110.286.000
3	Pendapatan BLUD	31.085.233.812	28.427.450.000
4	Kapitasi JKN dan Klem JKN (BPJS)	4.003.130.843	3.171.257.500
	Total	216.700.422.187	221.805.824.889

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan pada OPD Dinas Kesehatan TA. 2023 dan 2024 meliputi :

No	Jenis DAK/ Menu/ Sub Menu	TA 2023	TA 2024
A.	DAK Fisik	486.573.000	5.648.689.000
	Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	433.813.000	5.648.689.000
	Sub Bidang Peningkatan dan Pencegahan Pengendalian Penyakit	52.760.000	-
	Sub Bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	-	796.604.080
B	DAK Non Fisik	18.419.667.000	20.257.941.000
	BOK Dinas Kesehatan Kab/Kota	6.335.312.000	8.664.251.000
	BOK Puskesmas	11.650.991.000	11.212.059.000
	DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan	433.364.000	381.631.000
	Total	18.906.240.000	25.906.630.000

Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Bintan pada tahun 2023 dan 2024 masih memprioritaskan kegiatan bidang kesehatan pada :

- a. Meningkatkan kesehatan masyarakat miskin dengan jaminan kesehatan;
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan (promotif dan preventif)
- c. Peningkatan akses pelayanan Kesehatan dasar kepada Masyarakat.
- d. Peningkatan pelayanan Kesehatan Rujukan di RSUD Bintan.

Sementara beberapa permasalahan bidang Kesehatan yang menjadi prioritas utama pada tahun 2024 yang membutuhkan perhatian dan dukungan meliputi :

- a. Masih terdapatnya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di wilayah Kab.Bintan. walaupun angka tersebut telah lebih rendah dari target capaian Nasional maupun Provinsi Kepri, namun AKI dan AKB merupakan faktor utama dalam mencerminkan tingkat Derajat Kesehatan di suatu daerah.

- b. Masih terdapat Masyarakat yang masih belum memiliki jaminan pelayanan Kesehatan (Belum terdaftar BPJS) sekitar 7% dari jumlah penduduk Kabupaten Bintan.
- c. Masih rendahnya nilai indeks keluarga sehat (IKS) yaitu sebesar 0,37 dibawah angka 0,5 yang menjadi standar keluarga sehat di Indoneia, hal ini mencerminkan perilaku Masyarakat akan pentingnya Kesehatan masih rendah.
- d. Masih terdapat kekurangan 9 jenis tenaga kesehatan dasar di puskesmas seperti Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Tenaga Gizi, ATLM, Promkes dan Kesling terutama di beberapa Puskesmas di wilayah terpencil dan kepulauan.
- e. Terdapat fasilitas pelayanan Kesehatan dasar seperti Pustu dan Polindes di tingkat Desa dan Kelurahan yang dalam kondisi Rusak dan perlu dukungan fasilitas.
- f. Terbatasnya akses transportasi terutama di daerah terpencil dan kepulauan yang menghambat proses pelaksanaan rujukan pelayanan Kesehatan.

Selain permasalahan diatas, masih ada beberapa peta permasalahan yang mesti diselesaikan seperti:

- a. Terbatasnya anggaran pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan Kesehatan di daerah. Walaupun beberapa tahun terakhir besarnya anggaran DAK yang di gelontorkan pemerintah pusat ke daerah, namun tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan yang ada di daerah, karena anggaran DAK yang di berikan memiliki keterikatan pada Menu dan jenis kegiatan yang telah di tetapkan pemerintah pusat.
- b. Masih terdapat sekitar 7% masyarakat Kabupaten Bintan yang belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan (belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan). Sebagai gambaran jumlah penduduk Kabupaten Bintan perjanuari 2024 adalah 173.171 jiwa

- Jumlah penduduk Kabupaten Bintan per januari 2024 yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan adalah 161.938 jiwa (93,51%), antara lain terdiri dari:
 - a. PPU : 66.190 jiwa
 - b. PBI APBN : 41.009 jiwa
 - c. PBPB : 26.622 jiwa
 - d. PBI APBD : 26.255 jiwa
 - e. BP : 1.862 jiwa
 - Jumlah penduduk Kabupaten Bintan perjanuari 2024 yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan adalah 11.233 jiwa (6,49%)
 - Untuk menuju UHC minimal jumlah penduduk Kabupaten Bintan yang menjadi peserta BPJS Kesehatan harus 96%
 - Dinas Kesehatan telah mengajukan penambahan anggaran pada APBDP 2024, sehingga Kabupaten Bintan dapat mencapai UHC 96%.
- c. Dari 51 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bintan baru 23 desa/kelurahan terutama yg di darat yang sudah STOP BABS (45%) masih ada 28 desa/kelurahan terutama di daerah pesisir yang belum STOP BABS, perlu dukungan dari lintas program/listas sektor terkait untuk Pembangunan jamban teknologi tepat guna (TTG).

Untuk kepesertaan JKN Kabupaten Bintan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

CAKUPAN KEPESERTAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU							NON JKN		KET
NO	PROVINSI	KANTOR CABANG	KAB/KOTA	Penduduk SMT 1 2023	JML PESERTA JKN	%	JML	%	
1	KEPULAUAN RIAU	BATAM	KAB. KARIMUN	267.762	241.001	90,01%	26.761	9,99%	Mendekati UHC
2	KEPULAUAN RIAU	BATAM	KOTA BATAM	1.240.792	1.216.160	98,01%	24.632	1,99%	UHC
3	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG PINANG	KAB. BINTAN	173.171	162.060	93,58%	11.111	6,42%	Mendekati UHC
4	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG PINANG	KAB. LINGGA	102.474	99.049	96,66%	3.425	3,34%	UHC
5	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG PINANG	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	49.274	50.593	102,68%	(1.319)	-2,68%	UHC
6	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG PINANG	KAB. NATUNA	83.450	85.255	102,16%	(1.805)	-2,16%	UHC
7	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG PINANG	KOTA TANJUNG PINANG	233.406	220.464	94,46%	12.942	5,54%	Mendekati UHC
			TOTAL	2.150.329	2.074.582	96,48%	75.747	3,52%	UHC

dari tabel diatas, sampai dengan 31 Desember 2023 semester I tahun 2023, Kabupaten Bintan belum mencapai cakupan kepesertaan >95% (Belum UHC),

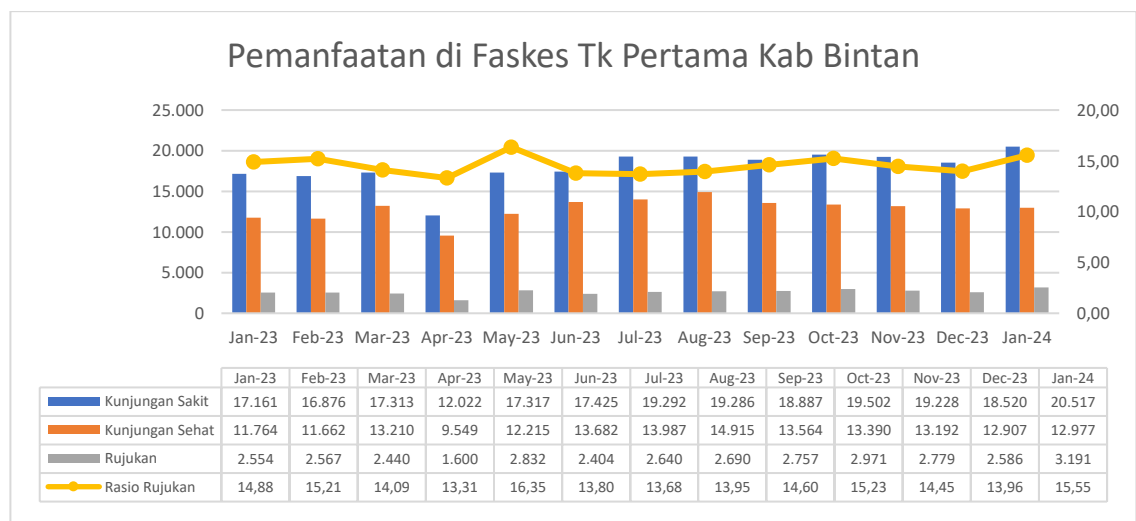
dan jika mengacu kepada Perpres 18/2020 tentang RPJNM 2020 – 2024 bahwa target cakupan kepesertaan JKN di tahun 2024 adalah 98%, maka Kabupaten Bintan masih ada selisih Non JKN sebanyak 7.648 jiwa.

Untuk gambaran kepesertaan per segmen di Kabupaten Bintan, sebagai berikut:

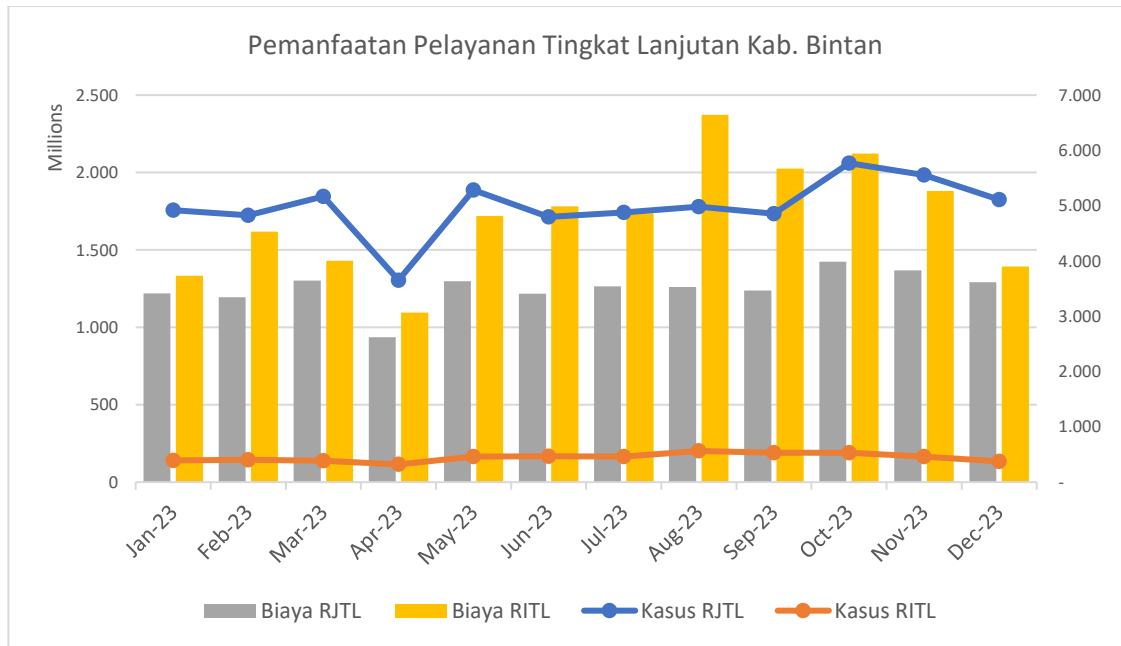
NO	KANTOR CABANG	PBI JK	PBPU/BP PEMDA	PPU BU	PPU PN	PBPU MANDIRI	BP	TOTAL TERDAFTAR JKN
1	KC BATAM	322.922	105.701	604.963	97.426	315.304	10.845	1.457.161
	KAB. KARIMUN	78.105	35.247	50.476	26.838	45.822	4.513	241.001
	KOTA BATAM	244.817	70.454	554.487	70.588	269.482	6.332	1.216.160
2	KC TANJUNGPINANG	184.647	133.644	99.391	113.761	75.091	10.887	617.421
	KAB. BINTAN	40.878	26.432	48.281	17.838	26.768	1.863	162.060
	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	10.565	20.768	2.717	15.484	779	280	50.593
	KAB. LINGGA	48.303	27.497	3.890	13.803	4.511	1.045	99.049
	KAB. NATUNA	28.046	30.196	3.331	20.980	1.967	735	85.255
	KOTA TANJUNG PINANG	56.855	28.751	41.172	45.656	41.066	6.964	220.464
TOTAL		507.569	239.345	704.354	211.187	390.395	21.732	2.074.582

Sampai dengan 31 Desember 2023 total peserta JKN-KIS Kabupaten Bintan mencapai 162.060 jiwa (93,58 %) dari 173.171 jiwa penduduk Kabupaten Bintan. Proporsi terbesar kepesertaan JKN adalah peserta segmen PPU BU sebanyak 48.281 jiwa (30%) dan selanjutnya segmen PBI JK sebanyak 40.878 Jiwa (25%), PBPU Mandiri 26.768 Jiwa (17%), PBPU/BP Pemda sebanyak 26.432 Jiwa (16%) serta PPU PN sebanyak 17.832 Jiwa (11%), Segmen Bukan Pekerja sebanyak 1.863 Jiwa (1%). Terdapat 11.111 Jiwa (6,42 %) penduduk Kabupaten Bintan yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

Untuk pelaksanaan program JKN di Kabupaten Bintan, dimana pemanfaatan layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama selama tahun 2023 sebanyak 212.829 kunjungan sakit, 154.037 kunjungan sehat dan 30.820 kasus yang dirujuk ke tingkat lanjutan. Rincian per bulan sebagai berikut:



Pemanfaatan layanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut selama tahun 2023 terlihat pada grafik berikut ini:



BINTAN		Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23
Kasus	RJTL	4.918	4.827	5.165	3.653	5.281	4.798	4.877	4.983	4.857	5.769	5.556	5.108
	RITL	395	405	389	321	464	467	462	564	532	530	460	373
Biaya	RJTL	1.219.063.000	1.194.370.100	1.302.698.770	935.023.100	1.297.434.100	1.217.060.500	1.265.267.500	1.260.819.400	1.236.829.370	1.423.221.900	1.368.242.800	1.291.232.600
	RITL	1.333.499.400	1.617.252.100	1.430.503.000	1.095.962.400	1.719.701.500	1.781.972.800	1.735.680.200	2.371.450.300	2.025.685.525	2.122.521.900	1.881.040.000	1.392.508.900

Jumlah jiwa yang mengakses layanan tingkat lanjutan per segmen peserta untuk wilayah Kabupaten Bintan adalah PPU BU sebanyak 4.956 jiwa (29,03%) dan PBI APBN sebanyak 3.512 jiwa (20,57%).

Untuk Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Bintan, masih terdapat permasalahan terutama pada sarana dan prasarana, dimana untuk saat ini gedung yang dipergunakan merupakan dengan hak sewa selama dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 ini. Sedangkan untuk sumber daya manusia, Pada Tahun 2023, Sumber Daya Manusia di Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri atas 17 (Tujuh Belas) orang yakni 11 (Sebelas) PNS, 2 (Dua) PPPK, dan 4 (Empat) PPNPN.

Sedangkan pada RSUD Kabupaten Bintan, masih terkendala terkait dengan ruang tunggu poli yang belum representatif, belum tersedianya gudang farmasi, dan gudang alat kesehatan serta keterbatasan gedung poliklinik (rawat jalan). Dan masih adanya perbedaan harga obat di Kabupaten Bintan yang harus ditanggung oleh pihak rumah sakit untuk pasien BPJS program kronis dengan klaim harga obat yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.

B. STUNTING KABUPATEN BINTAN

Data Anak stunting per oktober 2023 pada data EPPGBM (elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) di Kabupaten Bintan berjumlah 380 anak dari total 10.880 balita yang ditimbang di posyandu atau dengan angka prevalensi sebesar 3,49%. Sedangkan menurut hasil survei SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) yang dilakukan pada Tahun 2022, prevalensi stunting Kabupaten Bintan berada pada angka 17,8% dari sebelumnya pada tahun 2021 pada angka 20%. Sedangkan untuk tahun 2023 hingga saat ini masih menunggu informasi hasil SKI (survei Kesehatan Indonesia) dari kementerian kesehatan RI.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bintan sudah menyentuh setiap elemen sasaran seperti remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta hingga balita. Kegiatan tersebut antara lain:

- 1) **Pemberian Makanan tambahan** berbasis pangan lokal untuk sasaran bagi balita gizi kurang dan BUMIL KEK(Kurang energi kronik);
- 2) **Sosialisasi Gizi Ikan** dalam rangka membantu percepatan penurunan stunting dan penyerahan paket gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) dengan sasaran peserta keluarga beresiko stunting yang terdiri dari balita stunting, ibu hamil dan ibu menyusui dari 10 Desa/Kelurahan Lokus stunting;
- 3) **Penyelenggaraan Rantang Sehat** berupa pemberian pangan lokal yang dibuat oleh dapur desa yang isi didalamnya terdapat protein hewani dan nabati sesuai standar dari ahli gizi dari puskesmas, adapun menu nya disesuaikan dengan usia dan kebutuhan gizi anak dan diberikan kepada anak stunting;
- 4) **Perjanjian Kerja sama dengan dengan organisasi keagamaan.** Yaitu penjalinan komitmen bersama dengan organisasi lintas agama dalam upaya registrasi dan pendampingan, pemeriksaan kesehatan dan bimbingan catin dengan materi stunting bagi catin non-muslim. Hal ini dilakukan mengingat program stunting masih belum menyasar kepada catin-catin non-muslim;
- 5) **Akan dilakukan Kerja sama dengan PT. JAPFA.** Kerjasama ini sudah berada pada tahap finalisasi perjanjian. Dimana nantinya PT. JAPFA akan memberikan bantuan 2 butir telur perhari kepada setiap balita stunting dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) selama 3 bulan.

Dengan semua kegiatan yang sudah dilakukan, penanganan stunting di Kabupaten Bintan bukan tanpa masalah, dimana :

- a. masih belum adanya satu database stunting terintegrasi yang memuat informasi tentang Balita Stunting, Keluarga Stunting, Keluarga Penerima Manfaat, Keluarga yang tidak memiliki Jamban dan Sanitasi Layak, Keluarga yang tidak memperoleh akses air bersih serta keluarga yang tidak memiliki rumah tidak layak huni. Dimana hingga saat ini masing-masing perangkat daerah memiliki data cakupan dan sasaran nya masing-masing dan sulit untuk diintegrasikan dengan data lainnya karena tidak memiliki kesamaan Nomor/ kode keluarga yang digunakan;
- b. hasil SSGI/ SKI yang diterbitkan tidak dapat ditindaklanjuti dan diintervensi oleh Daerah karena tidak melampirkan informasi *by name by adres* Balita yang disurvei;
- c. Pemerintah Kabupaten Bintan hingga saat ini belum pernah menerima alokasi Bantuan Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT) oleh Pemerintah Pusat dalam upaya pemberian makanan lokal oleh Desa/ Kelurahan kepada Balita Stunting;

Sementara itu, anggaran DAK Sub Bidang KB adalah sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2022
Pagu DAK BOKB Rp.2.061.120.000,- realisasi Rp.1.474.201.962,- atau 71,52%
Pagu DAK Fisik Rp.1.354.910.000,-, Realisasi Rp.1.149.979.384 atau 84,87%
- b. Tahun Anggaran 2023
Pagu DAK Fisik Rp.345,000,000 realisasi Rp.237.237.000 atau 68,76%
Pagu DAK BOKB Rp.2.819.791.000,- realisasi Rp.2.675.341.550 atau 94,88%
- c. Tahun Anggaran 2024
Pagu DAK Fisik Rp.361.451.000,-
Pagu DAK BOKB Rp.2.388.846.000,-

BIDANG KETENAGAKERJAAN

A. Dinas Tenaga Kerja

Peningkatan kualitas SDM dengan program pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi dan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Tahun 2023 pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan sertifikasi dilaksanakan sebanyak 6 pelatihan bersumber dari APBD dengan total peserta sebanyak 126 orang. Pelatihan ini tetap dianggarkan kembali di tahun 2024 dengan sumber dana yang sama.

Program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dilaksanakan dengan menganggarkan Bantuan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah, sebanyak 3.000 orang pekerja rentan dan di tahun 2023 didapatkan 2.478 orang pekerja rentan di kabupaten bintang yang ditetapkan didalam Peraturan Bupati Bintang.

Peningkatan kuaalitas tenaga kerja dengan fokus meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dengan sertifikasi kompetensi tenaga kerja yang telah dilaksanakan setiap tahunnya serta menjadi program prioritas. Melakukan pembinaan BKK di SMK yang ada di wilayah Kabupaten Bintang serta memfasilitasi BKK untuk bekerja sama dengan perusahaan dalam hak Praktek Kerja Nyata untuk siswa SMK tersebut. Selain itu pemerintah Daerah juga telah menandatangani kerja sama (MOU) dengan 17 perusahaan tentang penempatan tenaga kerja, di dalam kerja sama ini kita menyepakati untuk mengutamakan pekerja lokal, berbagi informasi lowongan pekerjaan, informasi penempatan dan menerima pemagangan. 17 perusahaan yang dimaksud adalah : PT BAI, PT TAMAN INDAH, PT BIIE, PT AMC, PT A & ONE, PT BIONESIA, PT CCI, PT CEDAR, PT. CENTROTEC, PT ESCO, PT I – PEX, PT IS PREMIER, PT P + F, PT SINGATAC, PT SANDEN, PT SBP dan PT YEB.

Dalam rangka membantu para pencari kerja yang mendapatkan pelayanan pemerintah Kabupaten Bintang melalui Dinas Tenaga Kerja telah membuat aplikasi “SISTEM PELAYANAN PENCARI KERJA (SILANCAR)”. Dalam hal ini informasi tentang kebutuhan dan lowongan pekerjaan ada dalam satu aplikasi yang tertata dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi lowongan pekerjaan juga dapat diakses melalui media social (IG dan FB) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintang.

Capaian pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Bintang saat ini. Sejauh mana *Standar Sustainable Development Goals (SDGs)* diterapkan dalam upaya capaian pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Bintang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT

Kabupaten Bintan periode Agustus 2023 sebesar 5,43 persen. Angka ini dapat diartikan setiap 10.000 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 543 orang penganggur. Dibandingkan dengan Agustus 2022, TPT pada Agustus 2022 mengalami penurunan 1,48 persen poin.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 79.049 orang yang bekerja dan 4.543 orang yang menanggur. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2022, terjadi penambahan jumlah orang yang bekerja sebanyak 2.566 orang.

Pada Agustus 2023 TPAK Kabupaten Bintan sebesar 67,55 persen, mengalami peningkatan 1,51 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023 TPAK laki-laki sebesar 85,06 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 48,86.

Terkait dengan pekerja informal, Pada Agustus 2023, penduduk Kabupaten Bintan yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 33,97 persen, sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 66,03 persen. Persentase penduduk bekerja di kegiatan formal pada Agustus 2023 naik sebesar 4,98 persen poin jika dibandingkan Agustus 2021. Peningkatan penduduk bekerja pada kegiatan formal ini seiring dengan peningkatan penduduk yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan penduduk yang berstatus buruh/karyawan/pegawai.

Pemerintah Kabupaten Bintan telah menganggarkan kedalam program bantuan bagi pekerja bukan penerima upah (pekerja rentan). Dengan bantuan bagi pekerja penerima upah (pekerja rentan) sebanyak 2.478 orang pekerja yang di daftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan untuk program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan dan telah di tetapkan didalam Peraturan Bupati Bintan.

Sementara, terkait dengan keluhan dari tenaga kerja *outsourcing* hingga saat ini belum di temukan keluhan tersebut, dan mendapatkan upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT dan alih daya serta Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor 1316 tahun 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten Bintan Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp 3.950.950,-. Saat ini jumlah perusahaan *outsourcing* yang terdata sebanyak 17 perusahaan dengan 1.137 orang tenaga kerja yang digunakan oleh 15 perusahaan yang berada di wilayah kerja Kabupaten Bintan.

Hubungan industrial di Kabupaten Bintan terdapat 6 kasus perselisihan selama tahun 2023 yang meliputi 3 kasus diselesaikan dengan Perjanjian Bersama dan 3 kasus lainnya dengan anjuran dari mediator. Dalam setiap kasus perselisihan membutuhkan waktu rata-rata penyelesaian dalam satu kasus

30 (tigapuluh) hari setelah berkas diterima dan lengkap, kendala yang sering ditemui adalah masing-masing pihak selalu bertahan dengan pendapat dan ego masing-masing sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan.

Dinas Tenaga Kerja Kab. Bintan dalam menyelesaikan perselisihan sesuai dengan kewenangannya dengan melakukan mediasi dengan cara pendekatan kepada kedua belah pihak, dalam memberikan kepastian hukum atas hak-hak normatif pekerja di Kabupaten Bintan selalu turun ke perusahaan dalam rangka pembinaan terkait aturan ketenagakerjaan dan mendesak perusahaan agar membuat peraturan perusahaan supaya ada kepastian hukum bagi pekerja/buruh dan perusahaan.

Kebijakan dalam rangka meningkatkan lapangan kerja dan kualitas SDM melalui UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 34 tahun 2021. Kebijakan yang menjadi pintu gerbang masuknya investasi asing ke Indonesia dan mengatur mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam rangka perluasan lapangan kerja di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi iklim usaha di Indonesia.

a. Jumlah TKA dan perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri beserta jumlah persentase pekerja lokal dibanding pekerja asing di Kabupaten Bintan pemerintah daerah menyampaikan untuk di KEK Galang Batang posisi Desember 2023 jumlah TKA sebanyak 1.044 orang dan untuk Tenaga Kerja Indonesia 2.430 orang, jika menggunakan perbandingan antara TKA : TKI adalah 3:7.

b. Jumlah dan kenaikan investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Bintan.

BINTAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		Meningkat	Menu run
	Proyek	Nilai Investasi	Proyek	Nilai Investasi		
PMA	121	Rp2,517,030,000,000	195	Rp2,684,832,000,000		
PMDN	99	Rp1,045,445,800,000	203	Rp995,566,700,000		
JUMLAH	220	Rp3,562,475,800,000	398	Rp3,680,398,700,000	Rp117,922,900,000	-

- c. Persentase pertumbuhan TKA di Kabupaten Bintan. Dalam menggunakan TKA, pemerintah menetapkan kewajiban pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) besar DKPTKA di Kabupaten Bintan saat ini
REALISASI RETRIBUSI PTKA
2022: RP. 1.214.686.300
2023: RP. 1.423.436.000
- d. Jumlah TKA di Kab Bintan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 814 orang.

Berkaitan dengan meningkatkan pelatihan tenaga kerja di kabupaten bintan, Kabupaten Bintan bisa dikatakan belum maksimal, termasuk keberadaan Balai Latihan Kerja baik yang dimiliki oleh Pemda maupun Balai Latihan Kerja Komunitas. Sehingga Balai Latihan kerja harus di kembangkan di daerah Kabupaten Bintan dalam rangka memberikan bekal dan para calon pekerja atau pencari kerja memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.

B. BPJS Ketenagakerjaan

1. pekerja dalam jaminan sosial:
 - a. Jumlah perusahaan, pekerja baik yang mendaftar dan tidak mendaftar, (baik perusahaan plat merah dan swasta); dan
Jumlah Perusahaan yang terdaftar 2023 : 607
Jumlah Perusahaan yang belum terdaftar 2023: (tidak ada data)
 - b. Kepesertaan aktif dan tidak aktif, PU dan BPU dan TKA.
Kepesertaan Aktif PU 2023: 24.038
Kepesertaan tidak aktif PU 2023: 14.228
Kepesertaan Aktif PU 2022: 25.050
Kepesertaan Tidak Aktif PU 2022: 14.913
Kepesertaan Aktif BPU 2023: 10.823
Kepesertaan Tidak Aktif BPU 2023: 1.030
Kepesertaan Aktif BPU 2022: 4.889
Kepesertaan Tidak Aktif BPU 2022: 1.112
Kepesertaan Aktif TKA 2023: 814
Kepesertaan Tidak Aktif TKA 2023: (tidak ada)

2. Tingkat pemahaman dan kesadaran pekerja dan perusahaan mengalami trend positif melihat dari coverage share kepesertaan di Kabupaten Bintan pada tahun 2022 sebesar 47.824 atau 84,24% dari potensi 56.771 dibandingkan dengan coverage share tahun 2023 sebesar 50.181 atau 84,39% dari potensi 59.466.
Langkah yang sudah ditempuh dalam melaksanakan kepatuhan terhadap perusahaan yang tidak melapor dan tidak membayar iuran kepesertaan adalah dengan bekerjasama dalam hal pengawasan dan proses tindak lanjut hukum bersama Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kepri, Kejaksaan Negeri Kab Bintan dan POLDA Kepri
3. jumlah TKA dan pekerja lokal yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Mohon disampaikan data jumlah TKA dan pekerja lokal disektor pertambangan yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan saat ini.
Jumlah TKA Aktif : 814
Jumlah Pekerja Lokal Aktif : 17.516
Jumlah TKA Aktif pertambangan : 0
Jumlah Pekerja Lokal Aktif Pertambangan : 284
4. Dukungan pemerintah dalam rangka meningkatkan kepesertaan pekerja informal adalah
 - a. MOU Pemerintah Kabupaten Bintan dengan BPJS Ketenagakerjaan nomor : MOU/4/102021 tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - b. Peraturan Bupati Bintan Nomor 476/X/Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan.
 - c. Peraturan Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - d. PKS Disnaker Kabupaten Bintan dengan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 02/disnaker/2023 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Bintan.

- e. PKS Dinas Perikanan Kabupaten Bintan dengan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 5/pks/2023 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan.

IV. REKOMENDASI

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten Bintan terkait ketersediaan dan penyebaran Sumber Daya Manusia Kesehatan guna terwujudnya pelayanan kesehatan yang baik dan merata sesuai dengan tujuan transformasi bidang kesehatan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk terus melakukan koordinasi secara aktif kepada dan memberikan perhatian khusus kepada Pemerintah Kabupaten Bintan terkait dengan Balai Latihan Kerja maupun Balai Latihan Kerja Komunitas.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan RI untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bintan guna meningkatkan cakupan kepesertaan JKN sehingga UHC dapat terwujud sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan RI untuk terus melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan.

V. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI dalam rangka kunjungan kerja reses ke Pemerintah Kabupaten Bintan ini kami susun. Atas perhatian dan jawaban dari Pemerintah Kabupaten dan dukungan dari semua pihak, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, Maret 2024

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN BINTAN
KETUA TIM,**

ttd.

EMANUEL MELKIADES LAKA LENA

A-331